

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

KONSTRUKSI HUKUM & RESPONS MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL

Studi Socio-legal Terhadap
Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan, Dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia



Seri
Disertasi

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ vii

BAB 1.

LANDASAN, TEORI DAN PARADIGMA HUKUM ~ 1

A. Landasan Hukum Sertifikasi Halal ~ 1

1. Landasan Hukum Material ~ 1

1.1. Al Qur'an ~ 2

1.2. Al Hadits ~ 3

1.3. Ijtihad ~ 4

2. Landasan Hukum Formal ~ 5

2.1. Landasan Filosofis (*philosophie gelding*) ~ 5

2.2. Landasan Sosiologis (*sociologische gelding*) ~ 7

2.3. Landasan Yuridis (*juridische gelding*) ~ 8

2.4. Landasan Administratif ~ 14

B. Teori-teori Hukum ~ 24

C. Paradigma Hukum ~ 28

1. Paradigma Positivisme ~ 29

2. Paradigma Konstruktivisme ~ 31

BAB 2.**INTERAKSI MUI, KOMISI FATWA DAN LP POM-MUI TENTANG PRODUK HALAL ~ 33****A. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ~ 33**

1. Pengertian, Asas dan Visi-Misi ~ 33
2. Kedudukan dan Dinamika Kelembagaan ~ 35

B. Komisi Fatwa MUI ~ 37

1. Hakikat dan Kedudukan Fatwa ~ 37
2. Dasar Penetapan Fatwa ~ 39
3. Macam-macam Bentuk Fatwa ~ 40
4. Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa ~ 43
5. Contoh-Contoh Produk Fatwa ~ 45
 - 5.1. Fatwa Makanan dan Minuman ~ 45
 - 5.2. Hukum Hewan Glonggongan ~ 45

C. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI ~ 46

1. Pengertian dan Dasar Hukum ~ 46
 - 1.1. Pengertian LP POM-MUI ~ 46
 - 1.2. Dasar Hukum Terbentuknya LP POM-MUI ~ 47
2. Kedudukan dan Sejarah Perkembangan ~ 48
 - 2.1. Kedudukan LP POM-MUI ~ 48
 - 2.2. Sejarah Perkembangan LP POM-MUI ~ 49
3. Visi-Misi dan Struktur Kelembagaan ~ 51
 - 3.1. LP POM-MUI Pusat ~ 52
 - 3.1.1. Kepengurusan, Tugas dan Wewenang LP POM MUI Pusat ~ 52
 - 3.1.2. Jejaring LP POM-MUI ~ 53
 - 3.1.3. Sertifikasi Produk Halal di LP POM-MUI Pusat ~ 54
 - 3.2. LP POM-MUI Daerah ~ 55
 - 3.2.1. LP POM-MUI DKI Jakarta ~ 56
 - 3.2.2. LP POM-MUI Jawa Barat ~ 62

- 3.2.4. LP POM-MUI Jawa Tengah ~ 69
- 3.2.5. LP POM-MUI Provinsi Jawa Timur ~ 72
- 3.2.6. Rekapitulasi Sertifikat Halal LP POM-MUI Daerah ~ 83
- 4. Asas Proporsional Kerja LP POM-MUI Pusat dan Daerah ~ 84
- 5. Cara Kerja LP POM tentang Sertifikasi Produk Halal ~ 89
 - 5.1. Proses Sertifikasi Produk Halal ~ 89
 - 5.2. Sistem Pembiayaan Sertifikasi Produk ~ 90
 - 5.3. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen ~ 92
 - 5.4. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Produk Halal ~ 92
- D. Produk Halal ~ 93
 - 1. Prinsip-Prinsip Produk Halal ~ 93
 - 1.1. Prinsip-prinsip Produk Makanan ~ 94
 - 1.1.1. Makanan Halal ~ 94
 - 1.1.2. Makanan Haram ~ 95
 - 1.1.2.1. Bahan Pangan Hewani Segar ~ 99
 - 1.1.2.2. Bahan Pangan Hewani Olahan ~ 99
 - 1.1.2.3. Produk Samping Pemotongan Hewan ~ 103
 - 1.1.2.4. Bahan Tambahan Makanan (Aditif Makanan) ~ 104
 - 1.2. Prinsip-prinsip Produk Minuman ~ 106
 - 1.3. Prinsip-Prinsip Produk Obat-Obatan ~ 110
 - 1.4. Prinsip-prinsip Produk Kosmetika ~ 111
 - 2. Relasi Sertifikasi Halal dengan Labelisasi Halal ~ 114
 - 3. Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) ~ 123
 - 4. Auditing Penentuan Titik Kritis Kehalalan Produk ~ 134
 - 4.1. Identifikasi Titik Kritis Bahan ~ 137
 - 4.2. Titik Kritis Bahan Nabati ~ 137
 - 4.3. Titik Kritis Bahan Hewani ~ 138
 - 4.4. Titik Kritis Bahan Mikrobial/Bioteknologi ~ 139

- 4.5. Titik Kritis Bahan Lain-lain ~ 140
- 4.6. Identifikasi Titik Kritis Penyimpanan dan Lini Produksi ~ 141
- 4.7. Identifikasi Titik Kritis Pemajangan (*Display*) ~ 142
- 4.8. Identifikasi Titik Kritis Penyembelian ~ 142
- 4.9. Identifikasi Titik Kritis Distribusi dan Produk Impor ~ 143

BAB 3.

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL LP POM-MUI DAN IMPLIKASI HUKUMNYA ~ 144

- A. Pengertian Respons ~ 144
- B. Respons Masyarakat terhadap Penerapan Sertifikasi Produk Halal LP POM-MUI ~ 147
 - 1. Respons Masyarakat Produsen terhadap Sertifikasi Produk Halal dan Implikasinya ~ 149
 - 2. Respons Masyarakat Konsumen terhadap Sertifikasi Produk Halal dan Implikasinya ~ 157
- C. Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Respons Masyarakat ~ 184
- D. Relevansi Respons Masyarakat dengan Etika Berbisnis ~ 187
- E. Temuan Penyalahgunaan Produk Halal dan Tindaklanjutnya ~ 189
 - 1. Klasifikasi Penyalahgunaan Proses Produk Halal ~ 191
 - 2. Tindaklanjut Penyalahgunaan Proses Produk Halal ~ 205
- F. Penerapan Sertifikasi Produk Halal dalam Domain Agama dan Negara ~ 206
 - 1. Domain Agama dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 206
 - 2. Domain Negara dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 210
 - 2.1. Kondisi Idealita Hukum ~ 210
 - 2.2. Realisasi Penerapan Hukum dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 214
 - 2.3. Politik Hukum Sertifikasi Produk Halal ~ 215

- G. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Praktik Sertifikasi Produk Halal ~ 223

BAB 4.

UPAYA HUKUM IDEAL MENUJU SERTIFIKASI PRODUK HALAL YANG RESPONSIF, BERLAKU EFEKTIF DAN EFISIEN ~ 228

- A. Pendekatan Socio-Legal dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 229
1. Keniscayaan Perubahan Sosial dan Hukum ~ 229
 2. Pendekatan Socio-legal Sertifikasi Produk Halal ~ 237
- B. Komitmen Pengawasan dan Penegakan Hukum Sertifikasi Produk Halal ~ 245
1. Pengawasan dan Penegakan Hukum ~ 246
 2. Sifat Pengawasan dan Penegakan Hukum ~ 248
 - 2.1. Pendekatan Filosofis ~ 249
 - 2.2. Pendekatan Yuridis ~ 251
 - 2.3. Pendekatan Sosiologis ~ 254
 3. Penegasan Pengawasan dan Penegakan Hukum 255
 - 3.1. Unsur dan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum ~ 258
 - 3.1.1. Faktor Kaidah Hukum ~ 258
 - 3.1.2. Faktor Penegak Hukum ~ 259
 - 3.1.3. Faktor Fasilitas yang Digunakan Penegak Hukum ~ 261
 - 3.1.4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat ~ 263
 - 3.2. Koridor Pengawasan dan Penegakan Hukum ~ 266
 - 3.3. Praktik Pengawasan dan Penegakan Hukum ~ 270
 4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Sertifikasi Produk Halal ~ 275
 - 4.1. Faktor Pendukung ~ 275
 - 4.1.1. Perangkat Hukum ~ 276
 - 4.1.2. Sikap Mental Produsen ~ 276

- 4.1.3. Sikap Mental Konsumen ~ 278
- 4.2. Faktor Penghambat ~ 279
 - 4.2.1. Perangkat Hukum ~ 279
 - 4.2.2. Sikap Mental Produsen. 280
 - 4.2.3. Sikap Mental Konsumen dan Budaya Hukum Masyarakat ~ 281
- 4.3. Solusi ~ 282
 - 1.3.1. Paradigma Voluntary ~ 284
 - 1.3.2. Paradigma Mandatory ~ 286
- C. Kondisi "Yang Ada" tentang Pranata Hukum Halal ~ 287
- D. Tahapan Menuju Idealita Praktik Sertifikasi Produk Halal ~ 288
- E. Model Kajian dan Regulasi Hukum Sertifikasi Produk Halal: Upaya Hukum Ideal ~ 290
 - 1. Penguatan Konsep Hukum ~ 290
 - 2. Unifikasi Pranata Hukum ~ 291
 - 3. Pemberdayaan Ulama sebagai Pemegang Otoritas Produk Halal ~ 292
 - 4. Harmonisasi Hukum ~ 293

BAB 5.

KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKASI PRODUK HALAL

LP POM-MUI ~ 295

- A. Kekosongan Hukum Produk Halal ~ 295
- B. Konstruksi Hukum Sertifikasi Produk Halal: Sebuah Ijtihad Ilmiah ~ 301
 - 1. Kepastian Hukum ~ 304
 - 2. Keadilan Hukum ~ 306
 - 3. Kemanfaatan Hukum ~ 308
- C. Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia ~ 325
 - 1. Kebebasan Berusaha dan Kepastian Hukum ~ 325
 - 2. Keyakinan Konsumen dan Terlindunginya Hak Asasi Manusia ~ 335

- 2.1. Sertifikasi Halal dan Keyakinan Konsumen ~ 340
- 2.2. Perlindungan Sertifikasi Halal terhadap HAM ~ 347
- 3. Peranserta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ~ 354
- D. Konfigurasi Hukum dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 355
 - 1. Cita Hukum dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 357
 - 2. Proses Bekerjanya Hukum pada Sertifikasi Produk Halal ~ 360
- E. Pemanfaatan Paradigma Konstruktivisme dalam Sertifikasi Produk Halal ~ 369
 - 1. Seputar Paradigma Konstruktivisme ~ 369
 - 2. Implikasi Paradigma Konstruktivisme terhadap Corak Ilmu Hukum ~ 377
 - 3. Implikasi Paradigma Konstruktivisme terhadap Sertifikasi Produk Halal ~ 379
 - 3.1. Implikasi Konseptual ~ 379
 - 3.2. Implikasi Praktis ~ 380
 - 3.3. Implikasi Kebijakan ~ 381
- F. Otoritas Lembaga Sertifikasi Produk Halal ~ 382
- G. Pribumisasi Halal: Sebuah Tawaran Konsep ~ 385
 - 1. Zona Halal (*Halal Zone*) ~ 388
 - 2. Harmonisasi Halal (*Halal Harmony*) ~ 391
 - 3. Pribumisasi Halal Melalui Undang-Undang: Gagasan Strategis ~ 395
 - 3.1. Urgensi Undang-undang ~ 399
 - 3.2. Ruang Lingkup RUU Jaminan Produk Halal ~ 401
 - 3.2.1. Idealita Undang-Undang Jaminan Produk Halal ~ 401
 - 3.2.2. Label Halal dalam RUU ~ 402
 - 3.2.3. Sanksi (*punishment*) dan Penghargaan (*Reward*) ~ 402
 - 3.2.4. Kekuatan berlakunya ~ 403
 - 3.3. Pengawasan ~ 405

- 3.4. Reformulasi Naskah Akademik terhadap RUU JPH ~ 410
- 3.5. Dampak Keberlakuan UU Jaminan Produk Halal ~ 411
- 3.6. Hambatan Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal ~ 415
- 4. Globalisasi Halal ~ 416
 - 4.1. Perjanjian Ekstradisi ~ 419
 - 4.2. Halal sebagai Trend Global ~ 424
- H. Parameter Keberhasilan Pribumisasi Halal ~ 433
- Simpulan Penelitian ~ 435
- Daftar Pustaka ~ 436